KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Desakan Penundaan Terus Berlanjut
Tanggal : Selasa, 06 Juni 2023
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 8

RUU KESEHATAN

Desakan Penundaan Terus Berlanjut

JAKARTA, KOMPAS — Ribuan orang dari lima organisasi profesi kesehatan kembali berunjuk rasa menolak pembahasan Rancangan Undang-Undang Kesehatan di depan Gedung DPR, Jakarta, Senin (5/6/2023). Mereka menuntut pembahasan RUU itu transparan dan memperhatikan aspirasi organisasi profesi.

Unjuk rasa yang kedua kali ini melibatkan Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Ikatan Bidan Indonesia (IBI), Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI), Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), dan Ikatan Apoteker Indonesia (IAI). Sebelumnya, unjuk rasa dilakukan pada 8 Mei 2023 di kawasan Monas berlanjut di Kementerian Kesehatan.

Ketua Umum IDI Adhib Khumaidi mengatakan, tuntutan mereka masih sama dengan jilid pertama, untuk menghentikan pembahasan yang berlangsung di DPR. Substansi yang dibahas dalam RUU Kesehatan dinilai belum mengakomodasi soal kesehatan keseluruhan di Indonesia.

Selain itu, pembahasan RUU tersebut dinilai terburu-buru. Banyak masukan publik, termasuk tenaga kesehatan dan tenaga medis, tak diperhatikan dan tak masuk pembahasan RUU Kesehatan.

"Jika tuntutan tak dipenuhi, bersama organisasi profesi lain, kami akan aksi cuti layanan kesehatan," ujar Adhib seusai berorasi di depan Gedung DPR, kemarin. Meski demikian, "layanan kesehatan yang bersifat darurat akan tetap ditangani.

Juru bicara IDI, Benny Satria, mengatakan, mogok layanan itu disepakati bersama lima organisasi profesi, termasuk tenggat mulai memberlakukan cuti layanan. "Kami menyepakati, tapi masih menunggu perkembangan isu ini," lanjutnya.

Selama unjuk rasa sejak pukul 08.30 hingga pukul 13.00, massa aksi yang merupakan tenaga kesehatan dari sejumlah daerah itu menyuarakan mogok layanan jika aspirasi mereka tidak didengar.

Juru Bicara Kemenkes Mohammad Syahril menyayangkan akan seruan mogok massal tenaga kesehatan organisasi profesi. Padahal, pemerintah dan DPR telah mengakomodasi dengan sejumlah diskusi.

Sebelum draf RUU Kesehatan diserahkan ke DPR, konsultasi melibatkan sejumlah pihak, termasuk lima organisasi profesi. Saat berada di DPR, dengar pendapat publik terbuka. "Unjuk rasa itu hak demokrasi. Tetapi, jika sampai mogok massal, berarti mengkhianati demokrasi dan sumpah profesi," ucap Syahril.

Seusai dibahas di Kemenkes dan melakukan konsultasi publik, daftar inventarisasi masalah (DIM) diserahkan ke DPR pada 5 April 2023. Selanjutnya, DIM dibahas panitia kerja (panja) yang terdiri dari pimpinan dan anggota Komisi IX DPR.

Adapun DIM RUU Kesehatan yang diserahkan ke DPR oleh Kemenkes memuat 3.020 DIM pada batang tubuh dan 1.488 daftar inventarisasi masalah. Semuanya dirangkum dalam 478 pasal yang diusulkan ke RUU Kesehatan.

Dalam DIM yang diusulkan Kemenkes, 10 undang-undang dicabut dan 2 undang-undang diubah. Angka ini berbeda dengan draf sebelumnya yang diberikan DPR. Saat itu, 9 undang-undang dicabut dan 4 undang-undang diubah (*Kompas*, 6/4/2023).

Belum diakomodasi

Ketua PPNI Harif Fadhilah menyayangkan pembahasan RUU Kesehatan di panja terkesan tak mendengar masukan organisasi profesi. Banyak masukan mereka tak terakomodasi saat dengar pendapat publik. Bahkan, belakangan ini organisasi profesi tak lagi dilibatkan. Ia menduga ada upaya RUU itu segera diselesaikan pada masa sidang V DPR pada Juni-Juli 2023.

Di tempat terpisah, Wakil Ketua Komisi IX DPR dari Fraksi Partai Golongan Karya yang juga Ketua Panja RUU Kesehatan Emanuel Melkiades Laka Lena mengatakan, tim panja terbuka menerima masukan dari semua pihak, termasuk organisasi profesi.

Selama DIM RUU Kesehatan berada di panja sejak April lalu, organisasi profesi dua kali diundang untuk dengar pendapat. Hal rinci soal kewenangan organisasi profesi tak dibahas karena lebih membahas isu besar tenaga kesehatan agar layanan kesehatan lebih bermutu. "Aspirasi terbuka," ucap Emanuel. (Z07)

PERPUSTAKAAN DPR-RI